

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan permukiman ilegal di garis sempadan sungai telah memberikan kontribusi besar terhadap peristiwa banjir di Kota Jakarta. Hal ini dikarenakan, kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat menyebabkan terbentuknya pola permukiman di garis sempadan sungai, sehingga membuat aliran sungai menjadi lebih sempit. Menurut Eni (2015) banjir di Jakarta merupakan masalah yang sangat kompleks karena terkait dengan banyak sektor, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperbaikinya. Berikut adalah faktor-faktor keadaan yang memberi pengaruh terhadap terjadinya banjir di Jakarta:

- A. Pesatnya perkembangan pembangunan di Jakarta, membuat kondisi tata guna lahan jadi tidak sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Prakoso dan Herdiansyah (2019) memberitahukan bahwa implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta tidak mencapai 30% dari standar aturan RTRW. Keadaan ini menyebabkan daya serap air hujan menjadi tidak maksimal, banyaknya betonisasi yang melebihi aturan, menyebabkan air hujan yang harusnya terserap ke tanah menjadi mengalir di atas permukaan tanah dengan begitu cepat sehingga membuat genangan air dalam kapasitas yang besar.
- B. Tumbuhnya permukiman kumuh di atas garis sempadan sungai yang menyebabkan terjadi penyempitan pada aliran sungai. Padahal berdasarkan kondisi topografinya, Jakarta berada di dataran rendah sehingga 13 sungai yang ada di Jakarta berpotensi mengalami banjir, ditambah lagi dengan adanya kiriman air dari Jawa Barat (Departemen Lingkungan Hidup BEM UI dan Departemen SILL HMD Geografi UI, 2020). Apabila tidak ada perbaikan secara komprehensif terhadap RTRW di Jakarta, terutama pada area bantaran sungai yang memberi kontribusi terbesar, maka dapat dipastikan budaya banjir akan terus berlanjut.

Selain itu, keberadaan permukiman tersebut juga telah merusak lingkungan sungai, karena limbah dari permukiman langsung dibuang ke sungai. Menurut Ismuyanto (2010) 70% pencemaran sungai didapatkan dari limbah domestik yang di alirkan ke sungai.

Sebenarnya, sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatasi masalah permukiman ilegal di bantaran sungai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbaiki RTRW, seperti merelokasi permukiman kumuh yang berada di area sungai, sesuai dengan peraturan sungai yang tertuang di UU Nomor 38 Tahun 2011. Namun, kebijakan yang diterapkan masih belum optimal dalam mengembalikan fungsi sungai. Salah satu contoh kegiatan normalisasi yang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta timur yang terjadi tahun 2015. Berikut adalah gambaran perbedaan model permukiman kampung dari sebelum normalisasi dan pasca normalisasi.



Sumber: okezone.com, 2015 - detik.com, 2015 kompas.com, 2015

Gambar 1.1 Model permukiman Kampung Pulo, sebelum normalisasi, tahap normalisasi, & pasca normalisasi

Setiap program yang dilakukan pasti selalu memiliki dampak positif dan negatif, begitu juga dengan program normalisasi sungai yang dilakukan pada Kampung Pulo. Berikut adalah dampak positif dan negatif yang terjadi pasca normalisasi sungai di lokasi tersebut:

A. Dampak Positif

Berdasarkan Beritasatu.com (2016) Normalisasi sungai membuat daya tampung air Ciliwung mengalami peningkatan menjadi tiga kali lipat dari sebelumnya, sehingga Kampung Pulo menjadi bebas banjir, dan penataan di kawasan tersebut menjadi lebih baik. Selain itu, berdasarkan pengamatan dari peta satelit (*Google Earth*) memberitahukan bahwa kegiatan relokasi juga membuat tersedianya jalan baru di kawasan tersebut yang bisa dilalui dengan kendaraan.



Sumber: Google Earth, 2021

Gambar 1.2 Perbandingan model jalan Kampung Pulo sebelum dan sesudah normalisasi

B. Dampak Negatif

Berdasarkan Beritasatu.com (2021) menuliskan pendapat dari Bpk. Nirwono seorang ahli tata kota, beliau menyatakan bahwa praktik dari program normalisasi ke Rusunawa adalah salah, karena tidak ekologi, dan lebih layak disebut sebagai betonisasi. Sebab, program yang dilakukan pemerintah terlihat hanya sebatas betonisasi, dan masih kurangnya perhatian terhadap RTH. Selain itu, menurut CNN Indonesia (2020) normalisasi sungai menjadi kurang efektif pada musim kemarau, sungai menjadi cepat surut akibat dari derasnya aliran sungai, dan aliran tersebut akan membawa lumpur langsung ke laut tanpa ada penyaringan, sehingga kondisi tersebut berpotensi merusak habitat sungai dan laut.

Bahkan, dalam aspek sosial, program ini juga mendapatkan penolakan dari masyarakat yang terdusur, 89% menolak, dan hanya 11% yang menerima (Silalahi, 2017). Relokasi tersebut terbilang belum optimal dalam memperkirakan kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang dapat mendukung aktivitas seperti kondisi permukiman sebelum dinormalisasi, yang di mana terdapat aspek sosial ketetanggan, aspek ruang dalam mata pencarian (pedagang), dan terdapat aspek ketidaknyamanan tinggal di bangunan vertikal yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat nyaman untuk direlokasi ke hunian vertikal, sehingga masyarakat yang menolak tinggal di hunian vertikal akan berpotensi membentuk permukiman baru.

Berdasarkan keadaan dari program normalisasi sungai pada Kampung Pulo, maka masih perlu dilakukan evaluasi atau pengembangan program normalisasi, yang memperkirakan tentang keadaan sungai (RTH), kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang menjawab kebutuhan aspek sosial, ekonomi masyarakat, dan kenyamanan ketetanggan. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian tentang penataan bentuk pola baru pada permukiman pasca normalisasi sungai. Perubahan model atau revitalisasi permukiman tetap mengacu pada peraturan permukiman/perumahan, dan peraturan sungai.

Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mencoba mengkaji pendekatan konsep *Settlement Park*, pendekatan ini merupakan adopsi dari konsep *Urban Park* dalam skala yang lebih kecil. *Urban Park* didefinisikan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang difungsikan untuk kepentingan umum. Setiap wilayah harus memiliki RTH agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Agar kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan memiliki keseimbangan ekosistem kota, maka ditentukanlah standar 30% RTH (Cipta karya 2016). Jadi, dapat diasumsikan bahwa pendekatan tersebut bisa diterapkan pada semua jenis wilayah, termasuk di wilayah bantaran sungai.

Pengkajian akan berfokus pada jumlah ideal rumah atau tempat tinggal yang dapat berdiri di wilayah tersebut dengan kriteria rumah sederhana dari peraturan permukiman, dan disesuaikan dengan kebutuhan ruang pada permukiman. Selain itu, setiap rumah akan memperkirakan ruang buat taman, dan ruang untuk

pengolahan limbah produksi dari permukiman dengan media penyaring melalui taman buatan. Penerapan ini diperkirakan akan dapat meningkatkan kualitas sungai dan permukiman. Penelitian ini dilakukan pada skala ruang yang lebih kecil (RT), yaitu pada permukiman Kampung Baru, RT009/RW008, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, yang berada di area Sungai Cakung Drain, yang masuk dalam rencana program normalisasi.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.2.1 Tujuan Penelitian

- a. Membuat bentuk pola permukiman baru untuk kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai, yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah;
- b. Menganalisis peranan dari pendekatan *Settlement Park* dalam mengatasi masalah relokasi permukiman yang terkait kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sungai (RTH), dan masalah banjir.

1.2.2 Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan tentang *Settlement Park* dalam perencanaan tata kota yang terkait dengan kebutuhan tempat tinggal dan peningkatan kualitas sungai pasca relokasi permukiman di area sungai;
- b. Dapat menjadi referensi desain untuk Pemerintah Jakarta dalam merancang tata kota yang terkait dengan relokasi permukiman di area sungai.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1.3.1 Masalah Penelitian

- a. Bentuk pola permukiman yang tidak tertata di lokasi tersebut mengakibatkan kerusakan sungai (Air sungai yang tercemar, tidak adanya RTH);

- b. Kebutuhan akan tempat tinggal pasca normalisasi sungai, sebab relokasi yang dilakukan sebelumnya di Kampung Pulo mendapatkan tanggapan penolakan, yaitu 89% masyarakat menolak atau tidak nyaman tinggal di hunian vertikal karena terkait dengan aspek sosial, dan serta ekonomi;
- c. Model tempat tinggal/rumah yang sesuai dengan peraturan sungai, yang dapat meningkatkan kualitas sungai.

1.3.2 Pertanyaan Penelitian

- A. Bagaimana konsep *Settlement Park* membentuk pola permukiman:
 - a. Membentuk pola permukiman pasca normalisasi sesuai dengan peraturan sungai, peraturan permukiman dan mencakup kebutuhan masyarakat?
 - b. Membuat model tempat tinggal atau rumah yang sejalan dalam meningkatkan kualitas permukiman melalui media taman?
 - c. Meningkatkan kualitas RTH yang ideal terhadap kebutuhan lingkungan melalui refungsi RTH eksisting ?
- B. Apakah pendekatan *Settlement Park* dapat berpengaruh terhadap kebutuhan permukiman?

1.4 BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki batasan-batasan, yaitu:

- A. Ruang lingkup penelitian yang dipilih adalah permukiman Kampung Baru yang berada di badan Sungai Cakung Drain. Tepatnya berada di Jalan Cakung Drainase, RT009/RW008, Cakung Barat, Jakarta Timur. Permukiman berada di batas garis sempadan sungai, sehingga permukiman tersebut menjadi langganan banjir. Permukiman yang ditinjau memiliki panjang jalan $\pm 1,5$ Km berdasarkan perhitungan dari *Google Maps*.



Sumber: Google Maps, 2021 & Liputan6.com, 2020

Gambar 1.3 Peta Banjir Jakarta & Peta Permukiman

- B. Standar tentang sungai menurut Undang-undang Republik Indonesia. Sungai memiliki garis sempadan yang harus disesuaikan dengan lebar, kedalaman, dan model sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung, sehingga garis sempadan ini menghasilkan batas ruas sungai yang variatif sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu, ruang yang sudah menjadi garis sempadan sungai tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal.
- C. Definisi Permukiman yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang standar/kriteria dan kebutuhan yang diperlukan dalam suatu perumahan atau permukiman yang disebut layak tinggal.
- D. Karakteristik Permukiman mengenai kondisi eksisting pola permukiman, kategori permukiman, dan kebutuhan permukiman yang disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia.
- E. *Settlement Park* merupakan adopsi dari konsep *Urban Park*, penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada jumlah ideal rumah atau tempat tinggal di permukiman, perhitungan kebutuhan ruang buat taman, dan kebutuhan ruang untuk pengolahan limbah produksi dari permukiman dengan media penyaring melalui taman buatan.

1.5 HIPOTESIS

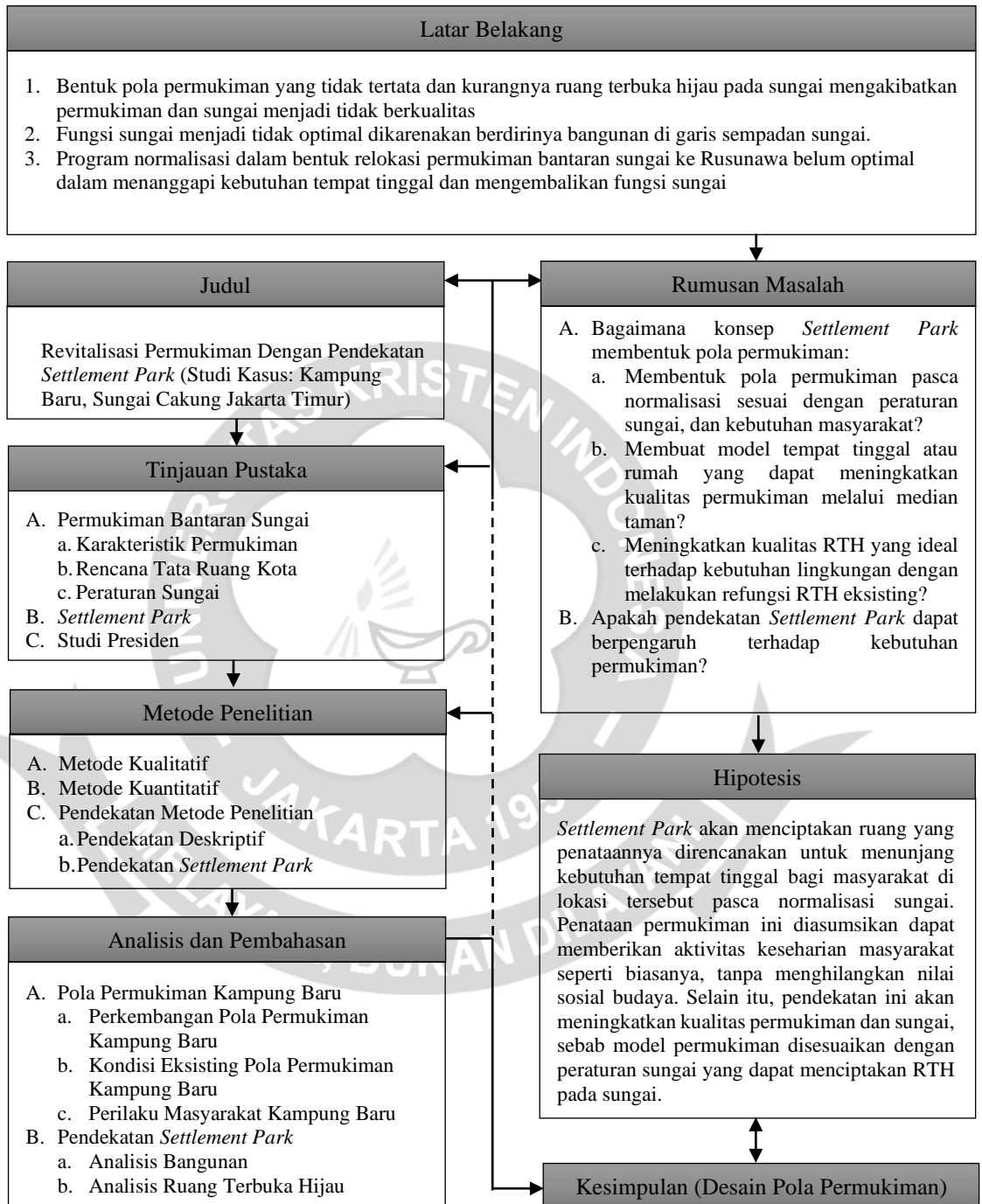
Pendekatan *Settlement Park* yang coba diterapkan dalam penelitian ini, tidak lepas dari hasil studi banding lain, dalam mengatasi masalah yang terjadi tentang permukiman di bantaran sungai. Beragam konsep atau penerapan yang telah

dilakukan pemerintah, seperti relokasi permukiman ke Rusunawa. Namun, perpindahan ini belum menjawab aspek-aspek kebutuhan masyarakat, sehingga terjadinya penolakan dari masyarakat yang direlokasi. Oleh karena itu, masyarakat yang menolak relokasi akan sangat berpotensi membentuk permukiman baru di lokasi lain. Kondisi tersebut dapat memicu suatu program yang sia-sia, dan masih perlu dilakukan pengkajian lebih dalam terhadap program normalisasi sungai.

Maka dengan itu, saya mencoba mengembangkan program normalisasi sungai dengan pendekatan konsep *Settlement Park*. Program ini diasumsikan akan sangat cocok dan berguna dalam mengatasi masalah kebutuhan tempat tinggal yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas sungai, dan setiap rumah pada permukiman tidak akan mengalami dampak kerusakan akibat dari banjir yang terjadi setiap tahunnya di wilayah penelitian. Sambil menunggu keseluruhan aspek dibenahi, dan tepat sasaran dalam mengatasi masalah banjir. Karena apabila ditelisik lebih dalam, masalah banjir yang terjadi di Jakarta sangat kompleks, dan memiliki kaitan dengan berbagai aspek yang perlu dibenahi.

Hal ini dikarenakan konsep *Settlement Park* akan menciptakan ruang yang penataannya direncanakan untuk menunjang tetap adanya aktivitas keseharian masyarakat yang sama, seperti sebelum direlokasi. Namun, setiap penerapan dilakukan akan tetap mengikuti aturan sungai. Sebab, dalam penataan pola permukiman terdapat perhitungan yang akurat, yang disesuaikan dengan luasan lahan dan garis sempadan sungai. Adapun untuk mendapatkan jumlah yang ideal, perhitungan dilakukan dengan membuat ukuran baru yang sesuai kebutuhan ruang, berdasarkan ukuran rata-rata tertinggi. Selain itu, pendekatan ini akan meningkatkan kualitas permukiman dan sungai, dengan menciptakan RTH pada sungai, membuat taman pada rumah, dan menerapkan sistem pengolahan limbah yang di produksi dari permukiman.

1.6 KERANGKA PIKIRAN



Sumber: Penulis, 2021

Diagram 1.1 Kerangka Pikiran

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

A. BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini akan dipaparkan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yang menjadi isu atau disimpulkan menjadi suatu masalah yang ingin diketahui jawabannya, dan untuk mengetahui tujuan serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

B. BAB II: Tinjauan Teori

Bab ini berisikan teori primer dan teori sekunder, yang didapatkan dari berbagai sumber (buku, jurnal, berita, dll.) yang akan digunakan sebagai pedoman pada penelitian yang akan mengetahui perubahan karakteristik permukiman dengan menggunakan pendekatan *Settlement Park*.

C. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan pendekatan *Settlement Park*. Penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu; tahap pertama adalah tahap pemilihan obyek yang ingin diteliti dan pengumpulan data, dan tahap kedua, analisis awal dengan membanding hasil dari data-data yang telah diperoleh dari survei lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan.

D. BAB III: Pembahasan

Bab ini berisikan hasil dari Analisis pendekatan konsep *Settlement Park* terhadap pembentukan karakteristik permukiman, untuk mengetahui perubahan desain yang tepat dan sesuai untuk wilayah penelitian.

E. BAB V: Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang didapatkan setelah melakukan analisis, dan merupakan hasil dari gambaran perubahan pola permukiman melalui desain yang sudah dibuat.